

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional dalam beberapa tahun ke depan telah dicanangkan oleh pemerintah untuk merespon tingginya proporsi penduduk usia produktif Indonesia yang pada tahun 2018 mencapai 181,3 juta jiwa atau 68,6 % dari jumlah penduduk Indonesia, (Bappenas, 2019). Dengan proporsi tersebut Indonesia berpeluang menjadi negara yang berpenghasilan menengah ke atas. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut, pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter yang salah satu faktor penunjang utama untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia melalui layanan pendidikan.

Meskipun akses pendidikan meningkat dari tahun ke tahun bahkan mencapai 85% penduduk usia 15 tahun bersekolah pada tahun 2018, (OECD, 2018) yang menjadikan Indonesia menjadi negara tercepat dalam memperluas akses pendidikan, (Litbang Kemdikbud, 2019). Namun, meluasnya akses pendidikan belum berbanding lurus dengan kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan yang bermutu hanya dapat dijangkau dan dirasakan oleh beberapa kalangan masyarakat yang mampu memenuhi biaya pendidikan yang relatif tinggi dari sekolah-sekolah swasta. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan masyarakat atau nonformal mencapai 1.283.023 (Kemdikbud, 2019). Dari Jumlah tersebut terdapat sekitar 11.000 anak usia sekolah yang *homeschooling*, (Tirto, 03/09/2016). Hal ini juga dibuktikan dengan hasil skor *Programme For International Student Assessment (PISA)* yang menunjukkan tren penurunan dalam kemampuan membaca, matematika dan sains pada tahun 2018.



Gambar 1.1 Skor PISA Indonesia Tahun 2000-2018

Penurunan skor PISA tersebut menyiratkan bahwa ada masalah yang harus segera diperbaiki dalam bidang pendidikan, atau dengan kata lain keadaan pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Maka, diperlukan evaluasi menyeluruh pada program-program pendidikan yang sudah berjalan, baik yang menyangkut siswa, pelatihan guru, pendanaan dan lainnya, (Media Indonesia, 04/12/2019).

Pada abad ke 21 ini, manusia membutuhkan pendidikan layaknya kebutuhan pokok sandang dan pangan untuk bertahan hidup. Seperti yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” serta “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pemerintah telah berupaya keras dalam menunaikan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini terbukti dengan data capaian akses pendidikan yang semakin meningkat dari rentang tahun 2000 sampai 2015, untuk jenjang sekolah dasar peningkatan angka partisipasi murni (APM) 99,5%, SMP 89,5% dan SMA 70,7% (*Indonesia Family Life Survey* dalam RISE Program, 2018). Kualitas pembelajaran masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, siswa bersekolah belum tentu belajar, (Beatty dkk., 2018). Hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Hak atas pendidikan warga negara tidak hanya didapat melalui pendidikan formal, sistem pendidikan formal yang terkesan menyeragamkan siswa membuat banyak orang tua kurang puas dan kecewa dengan proses pembelajarannya karena dianggap tidak mengakomodir kebutuhan, bakat, minat dan potensi anak. Sehingga muncul pendidikan alternatif untuk anak agar dapat berkembang dengan maksimal melalui jalur pendidikan informal dan nonformal yaitu *homeschooling* atau sekolah rumah.

Permendikbud Nomor 129 tahun 2014 tentang sekolah rumah mendefinisikan bahwa

sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.

Fenomena munculnya *homeschooling* atau sekolah rumah sebagai alternatif pendidikan untuk anak semakin meningkat dan menjamur, terlebih kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan aturan yang memperkuat keberadaan sekolah rumah dan anak-anak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Tercatat sebanyak 11.000 usia anak sekolah yang menjalankan *homeschooling* atau sekolah rumah (Kemendikbud,

2015). Jumlah yang tidak sedikit dan semakin menjalar menjadi tren pendidikan alternatif di Indonesia. Pendidikan alternatif yang memerdekakan anak untuk belajar dan berbasis pada keluarga. Orang tua sah-sah saja mendidik anaknya di rumah karena orang tua ragu terhadap kualitas pendidikan formal yang ada (Suyanto, 2006). Selama fokus terhadap anak dan dapat berkembang sesuai dengan potensialnya kenapa tidak. Selama *homeschooling* atau sekolah rumah tidak memerlukan pengakuan dari pemerintah, maka proses tersebut termasuk ke dalam pendidikan informal. Namun, jika hasil belajar anak *homeschooling* atau sekolah rumah ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan mendapatkan bukti kelulusan yang berupa ijazah, maka anak harus mengikuti ujian program pendidikan kesetaraan yang diadakan oleh lembaga pendidikan nonformal seperti Sanggar Belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan demikian anak mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama saat ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan formal atau ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebanyak 18.911 satuan pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan nonformal di Indonesia, (Kemdikbud, 2019), hal ini membuktikan bahwa jalur pendidikan nonformal yang di dalamnya termasuk *homeschooling* atau sekolah rumah menjadi pilihan alternatif lain mendapatkan layanan pendidikan. *Homeschooling* sendiri juga telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dimulai dengan pemaknaan bahwa pendidikan berbasis keluarga yaitu keluarga atau orang tua yang menyelenggarakan pendidikan kepada anaknya telah difasilitasi oleh pemerintah melalui regulasi yang memungkinkan bahwa *homeschooling* dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu tunggal, majemuk dan komunitas, dan *Homeschooling* Primagama Bandung menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dalam bentuk *homeschooling* komunitas.

Tabel 1.1. Gambaran Umum Pendidikan Masyarakat di
Tiap Provinsi

TABEL / TABLE : 2 Dikmas 19/20

GAMBARAN UMUM KEADAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TIAP PROVINSI
OVERVIEW OF COMMUNITY EDUCATION BY PROVINCE

KURUN WAKTU / PERIOD : JANUARI - DESEMBER / JANUARY - DECEMBER 2019

No.	Provinsi Province	Satuan Pendidikan (SP) Education Units (EU)	Warga Belajar (WB) Participants	Kepala Sekolah Headmaster	Pendidik Educators
1	DKI Jakarta	553	36.689	141	1.887
2	Jawa Barat	2.934	302.186	965	7.619
3	Banten	590	52.728	184	1.741
4	Jawa Tengah	1.798	151.201	389	5.539
5	DI Yogyakarta	324	15.890	64	788
6	Jawa Timur	2.421	199.691	640	5.472
7	Aceh	558	39.485	211	1.563
8	Sumatera Utara	1.385	69.899	325	2.572
9	Sumatera Barat	413	41.004	116	1.459
10	Riau	383	27.491	120	1.380
11	Kepulauan Riau	207	12.798	32	303
12	Jambi	371	30.648	90	1.064
13	Sumatera Selatan	458	46.745	129	1.178
14	Bangka Belitung	114	11.068	33	367
15	Bengkulu	250	19.829	106	691
16	Lampung	499	54.909	198	1.521
17	Kalimantan Barat	310	30.081	70	802
18	Kalimantan Tengah	210	19.081	45	614
19	Kalimantan Selatan	403	43.241	94	1.381
20	Kalimantan Timur	296	22.544	66	791
21	Kalimantan Utara	77	7.879	14	254
22	Sulawesi Utara	212	21.443	47	433
23	Gorontalo	173	12.869	26	429
24	Sulawesi Tengah	390	23.162	53	668
25	Sulawesi Selatan	769	94.318	169	2.661
26	Sulawesi Barat	236	29.766	56	484
27	Sulawesi Tenggara	466	45.258	95	1.162
28	Maluku	123	12.593	30	244
29	Maluku Utara	189	12.488	38	282
30	Bali	270	13.769	35	694
31	Nusa Tenggara Barat	646	77.429	200	1.740
32	Nusa Tenggara Timur	328	34.232	88	955
33	Papua	443	32.015	103	994
34	Papua Barat	112	7.242	23	188
	Indonesia	18.911	1.651.671	4.995	49.920

(Sumber: Kemdikbud, 2019)

Homeschooling Primagama merupakan layanan pendidikan alternatif yang menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan bersifat kekeluargaan di rumah bagi perorangan maupun komunitas dengan menggunakan ketercapaian materi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang diberlakukan pada jalur pendidikan formal. Ada dua pendekatan proses pembelajaran yang digunakan oleh *Homeschooling* Primagama yaitu menggunakan pendekatan psikologis dan pendekatan akademik. Pendekatan-pendekatan tersebut

dielaborasikan dengan program-program yang diselenggarakan di berbagai kantor cabang *Homeschooling* Primagama antara lain Pendidikan Kesetaraan Paket A, B maupun C dengan sistem belajar tatap muka, tutorial dan kegiatan mandiri. Sehingga keluaran yang ingin dihasilkan oleh *Homeschooling* Primagama adalah peserta didik memiliki keseimbangan kemampuan ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang baik, keterampilan atau kecakapan hidup serta sikap hidup (*attitude*) yang baik. Sejak didirikan pertama kali yang berpusat di Yogyakarta, saat ini di Indonesia terdapat 25 lembaga penyedia *Homeschooling* Primagama dan mengindikasikan bahwa pendidikan alternatif yang berbasis sekolah rumah semakin diminati oleh masyarakat. Dengan konsep sekolah berbasis minat dan bakat, *Homeschooling* Primagama semakin meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui guru-guru yang berkualitas baik, sehingga hasilnya tidak berbeda dengan proses pembelajaran yang ada pada jalur pendidikan formal. Di Bandung sendiri, *Homeschooling* Primagama membuka tiga kantor unit cabang yang terletak di Jalan Parakan Ayu II No.8 Soekarno Hatta Bandung, Komplek Setra Asih Kavling No.5 Jalan Sari Asih Bandung dan Jalan Saad 28 A Naripan, Bandung. *Homeschooling* Primagama menyediakan berbagai kurikulum yaitu kurikulum 2013, kurikulum internasional Cambridge dan kurikulum inklusi dalam menyelenggaraan pendidikannya. Siswa atau peserta didik dan orang tua diberikan kewenangan dan kebebasan dalam memilih kurikulum yang akan digunakan sesuai minat dan bakat anak. Dengan demikian, harapannya anak dapat berkembang secara maksimal dengan dipandu dan didampingi orang tua di rumah. Berdasarkan data dari kemdikbud (2019), provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang paling terbanyak menyediakan Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar Paket A, dengan warga belajar sebanyak 22,637 orang.

Implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan dari kurikulum yang berbentuk dokumen menjadi operasional konkrit kurikulum sebagai aktifitas nyata, (Sagala, 2007). Kurikulum 2013 mulai diberlakukan sejak awal sampai sekarang sudah hampir tujuh tahun pelaksanaan ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Sementara target pemerintah bahwa kurikulum 2006 hanya dapat dilaksanakan maksimal pada tahun ajaran 2019/2020 oleh sekolah. Hal ini berarti bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah Indonesia wajib mengimplementasikan kurikulum 2013 setelah tahun ajaran 2019/2020. Sementara untuk Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar atau Paket A, pemerintah mengeluarkan kebijakan kontekstualisasi kurikulum 2013 bagi Pendidikan Kesetaraan. Proses pembelajaran yang didasarkan pada modul pembelajaran kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar mengarahkan peserta didik atau siswa belajar mandiri.

Belajar mandiri bukan berarti tidak ada pertemuan di kelas, tetapi tetap membutuhkan tutor atau guru untuk melakukan pembelajaran baik secara tatap muka maupun daring. Karakteristik pembelajaran kurikulum 2013 jenjang sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan saintifik dan tematik yang mendorong siswa aktif dan merubah paradigma dari *teacher-center* menjadi *student-center* mengharuskan guru berperan menjadi lebih kompleks dan dinamis bukan hanya sebagai penyalur pengetahuan tetapi juga sebagai fasilitator, tutor, mentor, *coach*, dan menjadi salah satu sumber belajar yang memudahkan siswa untuk mencari dan membangun pengetahuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Misbah dkk., (2015) menyatakan bahwa peran guru yang semakin beraneka ragam bukan hanya menjadi *knowledge transmitter* tetapi juga, fasilitator, mentor, *coach* dan sumber informasi ketika berinteraksi. Kurikulum 2013 yang relatif berbeda karakteristik dengan kurikulum sebelumnya (KTSP) telah dikembangkan dengan mengakomodir dan didasarkan pada tantangan abad 21 yang bercirikan dengan *knowledge-based society* serta kompetensi masa depan. Terlebih pada jenjang pendidikan dasar yang dituntut mampu menanamkan nilai-nilai karakter dan membentuk kepribadian peserta didik sejak dini sehingga menjadi modal untuk keberlangsungan pengembangan kehidupan peserta didik di masa depan.

Capaian pembelajaran kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar memberikan bagian yang lebih besar dan mengarah pada dimensi sikap atau afektif peserta didik dibandingkan dimensi pengetahuan dan keterampilan. Sesuai semboyan kementerian pendidikan dan kebudayaan yaitu “cerdas berkarakter” menjadi acuan bahwa dasar sikap yang baik akan menghasilkan karakter yang kuat untuk mengasah kecerdasan di setiap jenjang pendidikan selanjutnya. Kompetensi peserta didik sekolah dasar yang terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan menjadi dasar melaksanakan proses pembelajaran yang utuh menyesuaikan capaian perkembangan peserta didik. Dengan demikian, dari proses pembelajaran yang utuh peserta didik diharapkan mempunyai kualitas pribadi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, seperti apa yang diungkapkan Sukmadinata (2002) bahwa kurikulum berbasis kompetensi tidak hanya menekankan pada isi kurikulum, tetapi juga pada kompetensi, kemampuan atau kecakapan kerja, cirinya adalah dengan mencapai kompetensi minimal dalam suatu bidang atau mata pelajaran tertentu.

Kurikulum erat kaitannya dengan kualitas pendidikan karena kurikulum mencakup secara langsung empat standar nasional pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Empat standar tersebut setidaknya dapat

menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan. Standar-standar tersebut harus dijalankan oleh guru sebagai implementator kurikulum, maka kualitas sistem pendidikan sendiri tercermin dan tidak melebihi dari kualitas pendidik atau gurunya, (McKinsey & Company, 2007). Dengan kata lain kualitas guru atau pendidik sangat mempengaruhi dan menggambarkan kualitas sistem pendidikan itu sendiri sebagai implementator kurikulum. Bahkan, guru yang berkualitas ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada sistem pendidikan. Oleh karenanya, seberapa pun baik kualitas suatu sistem pendidikan tidak akan melebihi kualitas gurunya, (World Bank, 2012) dan guru menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan capaian belajar siswa, (McKinsey & Company, 2017). Guru yang berkualitas adalah guru yang mampu memahami, menerjemahkan dan mengimplementasikan kurikulum dengan baik dan benar dalam pembelajaran di kelas. Implementasi kurikulum 2013 yang diterapkan pada program pendidikan kesetaraan *Homeschooling Primagama Bandung* perlu dilihat apakah kompetensi lulusan sesuai dengan standar kelulusan yang diinginkan, proses pembelajaran sesuai dengan standar proses, dan penialain pembelajaran dalam kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan telah mengikuti standar penilaian, sehingga kualitasnya terlihat dan jika ditemukan komponen-komponen yang belum sesuai dapat dilakukan perbaikan.

Pencapaian hasil belajar peserta didik berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial, ini dibuktikan dengan peserta didik yang capaian hasil belajarnya lebih tinggi baik di negara yang sedang berkembang dan negara maju pada ujian internasional seperti PISA dan TIMSS cenderung memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, (World Bank, 2012). Ketidakmampuan siswa dalam berpikir analitis dalam pembelajaran berasal dari kurangnya pengetahuan dan pengalaman guru dalam mempersiapkan manajemen pembelajaran untuk mengembangkan berpikir analitis, (Erwin, 1993; kammanee, 2003; Art-in, 2011). Kemudian diperjelas dengan guru yang jarang sekali mengelola pembelajarannya untuk mendorong siswa berpikir kritis, (Art-In, 2014). Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil belajar siswa dan guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun manusia Indonesia yang berintegritas dan berkinerja. Hal ini dapat dilihat pada angka indeks pembangunan manusia nasional yang mencapai angka 70,81 di tahun 2017, (Neraca Pendidikan Daerah, 2018).

Meyer dalam Hasan (2009) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan upaya untuk memahami pelaksanaan dan dampak dari suatu program. Beragam model evaluasi yang dihasilkan oleh banyak ahli evaluasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, seperti *Goal Free Evaluation Model* yang menekankan pada evaluasi tujuan instruksional, *Countenance Stake*

Model yang berorientasi pada program, *Discrepancy Model* yang menekankan pada ketimpangan perencanaan dan tujuan, *Kirkpatrick Model* yang berorientasi pada efektivitas program pelatihan, dan masih banyak model evaluasi lainnya. Setelah melihat orientasi dan penekanan model-model evaluasi dengan keperluan utama dalam penelitian ini yaitu untuk perbaikan implementasi kurikulum 2013, model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang mendasar pada pengertian

Evaluation is the process of delineating, obtaining, providing, and applying descriptive and judgmental information about the merit and worth of some object's goals, design, implementation, and outcomes to guide improvement decisions, provide accountability reports, inform institutionalization/ dissemination decisions, and improve understanding of the involved phenomena, (Kellaghan & Stufflebeam, 2003, hlm. 34).

Gagasan-gagasan utama dalam Model evaluasi ini terdapat dalam pengertian di atas yang memandang bahwa tujuan evaluasi untuk mengarahkan pembuatan keputusan, memberikan informasi untuk akuntabilitas, menginformasikan program yang sedang dijalankan atau dikembangkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang suatu fenomena yang terjadi pada program, sehingga dalam prosesnya berupa menggambarkan, mendapatkan, menyediakan dan mengaplikasikan informasi-informasi. Model CIPP sendiri terdiri dari *Context, Input, Process, and Product* yang dimunculkan dari pengertian evaluasi di atas yang akan menilai tujuan, rancangan, implementasi dan dampak dari suatu fenomena atau program. Model ini dianggap cocok dan sejalan dengan program pendidikan kesetaraan yang menggunakan kurikulum 2013 untuk memahami tujuan, rancangan, pelaksanaan dan dampak suatu kurikulum 2013 di satuan pendidikan. Model CIPP memberikan gambaran utuh dan menyeluruh tentang *Context, Input, Process dan Product* dari implementasi kurikulum 2013.

Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar perlu dievaluasi secara menyeluruh, salah satu alternatifnya dengan menggunakan model CIPP untuk mengetahui dan merekam bagaimana tujuan, desain, pelaksanaan dan dampak kurikulum 2013 di pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar *Homeschooling* Primagama Bandung. Evaluasi ini juga perlu dilakukan baik oleh internal dan eksternal evaluator untuk membantu pembuat kebijakan dalam menentukan keputusan bagian mana dari program yang akan diperbaiki, dilanjutkan bahkan diberhentikan. Selain itu, hasil evaluasi program dapat dijadikan pijakan atau dasar pengembangan program pendidikan kesetaraan kedepan. Maka, dapat dikatakan evaluasi implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan merupakan bagian penting dalam mengembangkan suatu desain program kedepannya.

Adapun penelitian evaluasi yang terkait dengan model evaluasi *Context, Input, Process, Product dan Outcome* (CIPPO) pada program *homeschooling* pernah dilakukan oleh Choiriyah (2014) dengan judul penelitian “*Evaluasi Program homeschooling group untuk anak usia 5-6 tahun*”, yang menyimpulkan bahwa aspek input perlu diperkuat dengan izin operasional penyelenggaraan program *homeschooling* group. Penelitian serupa yang berkaitan dengan model evaluasi CIPP terhadap pendidikan alternatif dilakukan oleh Bhakti, Y.B. (2017) dengan judul penelitian yaitu “*Evaluasi Program Model CIPP Pada Proses Pembelajaran IPA*” yang menyimpulkan bahwa persyaratan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran ditinjau dari aspek *context, input, process dan output* dapat dikatakan cukup efektif. Penelitian lain yang berkaitan dengan *homeschooling* dengan judul penelitian “*Evaluasi Program Pendidikan Alternatif di Kota Bandar Lampung*” dilakukan oleh Ananda, N.K. dan Herpratiwi (2018) yang mempunyai kesimpulan bahwa pendidikan alternatif mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, S. (2017) dengan judul “*Manajemen Kurikulum Homeschooling Group Berbasis Islam*” yang menyimpulkan bahwa pengorganisasian kurikulum cukup baik dengan pembagian wewenang dan peran antar warga belajar di *homeschooling*. Kesimpulan yang lain dari penelitian tersebut adalah evaluasi kurikulum terlaksana dengan baik, tetapi belum dilaksanakan secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar Di *Homeschooling* Primagama Bandung”?

Evaluasi implementasi kurikulum yang akan diteliti adalah aspek-aspek implementasi kurikulum 2013 yang terdiri dari konteks, input/masukan, proses dan produk pada program pendidikan kesetaraan sekolah dasar. Dengan pembatasan masalah penelitian tersebut maka, rumusan masalah secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian aspek konteks implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar di *Homeschooling* Primagama (HSPG) Bandung dengan kebutuhan peserta didik?
2. Bagaimana kesesuaian aspek input implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar *Homeschooling* Primagama (HSPG) Bandung

dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan dan standar pendidikan?

3. Bagaimana kesesuaian aspek proses implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar *Homeschooling* Primagama (HSPG) Bandung dengan standar proses pendidikan dasar?
4. Bagaimana kesesuaian aspek produk implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar *Homeschooling* Primagama (HSPG) Bandung dengan standar penilaian pendidikan dasar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kesesuaian konteks implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar di HSPG Bandung dengan kebutuhan peserta didik?
2. Untuk mengetahui kesesuaian Input implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar HSPG Bandung dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan?
3. Untuk mengetahui kesesuaian Proses implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar HSPG Bandung dengan standar proses pendidikan dasar?
4. Untuk mengetahui kesesuaian Produk implementasi kurikulum 2013 pada program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar HSPG Bandung dengan standar penilaian pendidikan dasar?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diiharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis serta manfaat-manfaat lain di bidang pendidikan.

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah khasanah keilmuan terutama dalam evaluasi pendidikan secara komprehensif dengan menggunakan model CIPP.

- b. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber data atau referensi untuk penelitian lanjutan tentang program pendidikan kesetaraan sekolah dasar *homeschooling*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman dan wawasan mengenai evaluasi implementasi kurikulum program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Pengalaman dan wawasan ini akan sangat berguna dalam memahami secara komprehensif dan mengembangkan ide mengenai implementasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan.
- b. Bagi Guru, dapat memberikan pengalaman dan dorongan langsung untuk merefleksikan apa yang telah didapat dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 program pendidikan kesetaraan SD
- c. Bagi Lembaga *Homeschooling* Primagama, dapat memahami dan memberikan wawasan mengenai implementasi kurikulum pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar serta program pendidikan kesetaraan sekolah dasar HSPG secara keseluruhan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan program pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar HSPG dan peningkatan kompetensi guru.

1.5. Definisi Operasional

1. Evaluasi

Evaluasi adalah proses pengumpulan data dan informasi secara menyeluruh yang ditujukan untuk perbaikan suatu program dan menjadikan pertimbangan dalam membuat keputusan tentang program.

2. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 merupakan pelaksanaan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program atau layanan pendidikan secara sistematis dan terarah berdasarkan kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Model CIPP

Model CIPP adalah model evaluasi yang dianggap model yang komprehensif dalam melakukan kegiatan evaluasi dengan mengevaluasi empat aspek yaitu;

- a. Konteks merupakan latar belakang yang mendasari munculnya suatu program dan tujuan program, *core value* yang dimunculkan dan dianggap penting, dan dampak

yang diharapkan dari program, sehingga dapat membantu pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

- b. Input / masukan merupakan dukungan yang tersedia dalam implementasi kurikulum baik secara konsep maupun operasional dalam mendukung implementasi kurikulum. Aspek input memperkuat perencanaan dan pemetaan kelebihan dan kekurangan sumber daya yang meliputi standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, sehingga mempengaruhi kebijakan perencanaan implementasi kurikulum.
- c. Proses merupakan pelaksanaan dari program yang telah direncanakan yang titik fokusnya terletak pada guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013 (Permendikbud No. 22 tahun 2016)
- d. Produk merupakan hasil capaian belajar peserta didik dan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik di lingkungannya berdasarkan standar penilaian kurikulum 2013, (Permendikbud No. 23 tahun 2016)

4. Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar

Pendidikan kesetaraan sekolah dasar yaitu layanan pendidikan nonformal/masyarakat yang diberikan kepada warga belajar sebagai pengganti dan alternatif pendidikan untuk memenuhi hak warga dalam mendapatkan pendidikan dan setara dengan pendidikan formal sekolah dasar.

5. Homeschooling atau Sekolah Rumah

Sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk dan komunitas, (Permendikbud No. 129 tahun 2014)